



Untuk segera diterbitkan

Anggota V BPK RI: WTP Harus Dorong Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Semarang, Senin (22/05) - Anggota V selaku Pimpinan Keuangan Negara V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2022 kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD Provinsi Jateng Tahun 2022.

Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jateng tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng Hari Wiwoho, para kepala subauditorat BPK Jateng, serta tim pemeriksa BPK atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2022.

Ketika menyampaikan sambutannya, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jateng yang telah berhasil mempertahankan opini WTP. “Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” tuturnya

Lebih lanjut, Anggota V BPK RI mengatakan bahwa meski memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut antara lain penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri di SMKN tidak sesuai dengan tata kelola keuangan daerah; realisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan; serta terdapat ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, kekurangan volume, dan pengaan denda atas kontrak pekerjaan belanja modal pada enam OPD.

Anggota V BPK RI juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Jateng untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan laporan pemantauan per Semester II Tahun 2022, 90,74% persen rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jateng. “Saya berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Selain menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022. IHPD Tahun 2022 memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Jateng selama tahun 2022, informasi profil entitas, serta tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II Tahun 2022.

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Email: humas.jateng@bpk.go.id